OMBUDSMAN KEPRI PANTAU PELAYANAN PUBLIK DI LUBUK BAJA, SOROTI MASALAH SAMPAH HINGGA POTENSI LONGSOR

Senin, 04 Mei 2026 - kepri

BATAM - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemantauan dan diskusi terkait pelayanan publik di Kantor Kecamatan Lubuk Baja pada Kamis (29/4/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan berjalan dengan baik dan responsif.

Dalam diskusi tersebut, Ombudsman Kepri menekankan bahwa pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk membantu pemerintah memberikan pelayanan yang memuaskan bagi warga.

"Jika masyarakat puas, citra pemerintah pun akan positif," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, didapati beberapa temuan. Pertama, sejumlah perwakilan lurah di wilayah Lubuk Baja menyampaikan beberapa kendala yang dialami warga, di antaranya masalah sampah dan banjir, ancaman longsor, dan prosedur pelayanan.

Kedua, di Kelurahan Lubuk Baja Kota, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sering terlambat. Sementara itu, warga di Kelurahan Batu Selicin (kawasan Marina Park) masih mengeluhkan banjir yang sulit diatasi karena adanya pipa gas dan bangunan yang menghalangi aliran sungai. Selanjutnya, Kelurahan Kampung Pelita melaporkan adanya titik rawan longsor di seberang Hotel Beverly yang mendesak untuk ditangani, namun perbaikannya terkendala pemotongan anggaran. Kemudian, Kelurahan Baloi Indah mengeluhkan adanya oknum atau kelompok yang ingin proses administrasi (seperti surat ahli waris) dilakukan secara instan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

Menanggapi laporan tersebut, Ombudsman Kepri meminta pihak kecamatan dan kelurahan untuk peka terhadap kebutuhan warga.

"Penyelenggara layanan harus mampu mengidentifikasi masalah lebih awal dan mencari solusi yang terintegrasi," tegas Lagat.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa setiap keluhan masyarakat harus segera dimonitor dan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar tidak berlarut-larut.

Ombudsman Kepri berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan ini demi terciptanya pelayanan publik yang prima di Kota Batam.